

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2009). *Partial Least Square (PLS): Alternatif SEM dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aditiya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013–2015. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1).
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 4(2).
- Almond, G., & Verba, S. (1984). *Budaya politik: Tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara*. Bina Aksara.
- Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan akuntabilitas publik melalui eGovernment*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anindita, F., Marbun, J., & Supriyadi, A. (2021). Pengaruh produk domestik bruto, nilai ekspor, dan inflasi terhadap investasi asing langsung di Indonesia pada tahun 2010–2019. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 8(1).
- Ardi, A. (2018). Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda APBD Kota Sorong No. 32 Tahun 2014. *JUSTISI*, 4(1), 14–29.
- Arifin, M., & Wibowo, T. (2020). Pengawasan DPRD terhadap anggaran kesehatan Kota Bandung di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Publik*, 15(2), 25–38.
- Astria, T., & Ardiyanto, M. D. (2011). Analisis pengaruh audit tenure, struktur corporate governance, dan ukuran KAP terhadap integritas laporan keuangan (Disertasi doctoral). Universitas Diponegoro.
- Badrudin, R. (2012). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Disertasi doctoral). Universitas Airlangga.
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2015). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 1–11.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, V. A. W. T., Apriyanto, T., & Cahyowati, A. (2024). Pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor terhadap persepsi kualitas audit aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 12, 1–19.
- Djamil, N. (2023). APIP dalam pelaksanaan maturitas SPIP: Government internal supervisory apparatus in implementing the maturity of the government internal control system. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(2), 76–88.
- Fadli, A. (2009). *Pelayanan publik dan fasilitas dasar dalam otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Fadli, A. (2009). *Pelayanan publik dan fasilitas dasar dalam otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Fuad, A. B. (2000). DPRD dalam masa transisi menuju demokrasi. *Jurnal Administrasi*, 1(1), 19–27.
- Gunawan, H. (2014). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi akan Program SmartPLS 3.0*. Edisi kedua. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Babin, B. J., & Tatham, R. L. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Herawati, S. (2017). *Evaluasi kinerja keuangan daerah*. Yogyakarta: UGM Press.



- Halim, A. (2007). *Evaluasi kinerja keuangan daerah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Harahap, S. S. (2006). *Globalisasi dan relevansi otonomi daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, S. S. (2006). *Globalisasi dan relevansi otonomi daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haryanto, B. (2008). *Desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Haryanto, B. (2008). *Desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Hasibuan, R. I. H. (2022). Efektivitas pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam sistem demokrasi (Studi di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(4).
- Hasyim, M. (2021). Prinsip otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 95–106.
- Haykal, M., Murhaban, M., & Indrayani, I. (2024). Analisis flypaper effect pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020–2021. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 3(1), 33–46.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-based Structural Equation Modeling. *Journal*.
- Ichsan, M., Ratih, & Trilaksono, N. (1997). *Administrasi keuangan daerah: Pengelolaan dan penyusunan APD*. Malang: Brawijaya University Pers.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Juanim. (2020). Analisis Jalur dalam Riset Pemasaran: Pengolahan Data SPSS & LISREL.
- Krina, L. P. L. (2003). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kurniawan, R. (2016). *Teori keagenan dan efisiensi pengelolaan anggaran*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kuswandi, A. (2012). Pembangunan wilayah secara berimbang. *Jurnal Kybernan*, 3(1), 47–53.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manginte, D., & Rekan. (2015). Pengetahuan anggaran serta peran partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan budaya politik terhadap pengawasan keuangan anggota DPRD (Studi kasus di Jayapura). *SNA XVIII*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2020). Pengelolaan keuangan daerah dan good governance terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. *AFRE Accounting and Financial Review*, 3(2), 152–158.
- Muhtadin, M. (2023). Analisis pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *AHKAM*, 2(2), 233–251. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1029>
- Muktar, M., Ibrahim, R., & Abdullah, S. (2018). Pengaruh kompetensi, pengetahuan tentang , pendidikan dan pelatihan serta pengalaman terhadap kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Aceh. *Jurnal if Ekonomi Darussalam*, 4(2), 213–230.
- Implementasi fungsi anggaran DPRD terhadap kinerja APBD Provinsi ). *Jurnal SIAP BPSDM Provinsi Gorontalo*, 2(1), 7–12.



- Negara, A. P. (2019). Pengaruh kapabilitas APIP, jumlah APIP dan anggaran belanja langsung APIP terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah [Disertasi doktoral, Universitas Lampung].
- Permata, N., Rahayu, S., & Yudi, Y. (2022). Pengaruh perencanaan, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderating. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)*, 7(2), 105–117.
- Puluala, M. G. (2021). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran kualitas sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa terhadap tingkat penyerapan anggaran daerah (Studi empiris pada organisasi perangkat daerah Kota Salatiga). *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i1.5>
- Putra, A., & Ismail, M. (2020). Kapabilitas DPRD dalam pengawasan anggaran: Perspektif transparansi dan akuntabilitas. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Riahi-Belkaoui, A. (2002). Profitability, multinationality and the investment opportunity set. *Advances in International Accounting*, 15, 1–12. [https://doi.org/10.1016/s0897-3660\(02\)15016-1](https://doi.org/10.1016/s0897-3660(02)15016-1)
- Robinson. (2006). Pengaruh kualitas anggaran terhadap efektivitas pengawasan anggaran: Pengetahuan tentang anggaran sebagai variabel moderating (Studi empiris pada DPRD Kabupaten & Kota Se-Propinsi Bengkulu) [Tesis Magister]. Universitas Diponegoro.
- Santosa, B. (2010). *Otonomi daerah dan tantangan globalisasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Santosa, B. (2010). *Otonomi daerah dan tantangan globalisasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Saragih, F. (2003). *Prinsip-prinsip desentralisasi kekuasaan dalam otonomi daerah*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Saragih, F. (2003). *Prinsip-prinsip desentralisasi kekuasaan dalam otonomi daerah*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Saragih, L. A. (2018). Pandangan anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2014–2019 terhadap hak politik perempuan [Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].
- Sari, E. N., & Lestari, S. (2018). Pengaruh kompetensi dan time budget pressure terhadap kualitas audit pada BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 81–92.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Simanjuntak, R. H. (2015). *Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, R. H. (2015). *Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah*. Jakarta: Kencana.
- Sopannah, A., Sudarma, M., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2013). Beyond ceremony: The impact of local wisdom on public participation in local government budgeting. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 11(1), 65.
- Subari, H. H. (2019). Pengaruh audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan di Jakarta Pusat. *Cakrawala Management Business Journal*, 2(2), 322–339.
- Subhan, S. M. (2011). Pengaruh good corporate governance dan leverage keuangan terhadap manajemen laba perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Universitas Madura*, 1(1), 1–10.
- Subhan, S. M. (2021). Akuntabilitas dan transparansi publik: Bagaimana pengaruh terhadap daya serap anggaran perangkat daerah di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Education and Management Research*, 9(4), 395–402.
- Subhan, S. M. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit



- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulfianty, S. (2019). Pengaruh kompetensi, independensi, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 3(2).
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59.
- Suryani, T. (2017). *Perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, T. (2017). *Perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo Bambang Yudhoyono. (2000). *Mengatasi krisis, menyelamatkan reformasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Suwandi, S., Thalia, J., Syakina, S., Munawarah, M., & Aisyah, S. (2019). Pengaruh rasio aktivitas, solvabilitas dan likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan batubara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(3), 182–188.
- Syahrudin, W. D., Ma, S. E., Taifur, W. D., & Indonesia, I. R. I. S. (2002). Peranan DPRD untuk mencapai tujuan desentralisasi dan perspektif daerah tentang pelaksanaan desentralisasi. *Regional University Research*. Fakultas Ekonomi Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas, Padang.
- Syuaib, M. R. (2020). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 2(2), 20–44.
- Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (6), 67–72.
- Wahyuni, E. T. (2020). Flypaper effect pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah di Indonesia pada tahun 2018 [Disertasi doktoral, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta].
- Widarjono, A. (2015). *Statistika Terapan*. Edisi pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widodo, J. (2008). *Efisiensi dan efektivitas pemerintahan di era otonomi daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Widodo, J. (2008). *Efisiensi dan efektivitas pemerintahan di era otonomi daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Winarna, J., & Murni, S. (2007). Pengaruh personal background, political background, dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 136–152.
- Witono, B., & Baswir, R. (2003). An analysis on influence of personal background and political culture on regional parliament's role in regional financial oversight. *Sosiohumanika*, 16A(3).
- Wulandari, A. (2017). Kemampuan keuangan daerah di Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 5(2), 22.
- Yunus, M., & Rabina, R. (2021). *Sistem keuangan daerah: Sistem keuangan daerah*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Yunus, R., & Sulistyowati, D. (2021). Studi efektivitas DPRD di Kabupaten Sleman: Pengaruh kapabilitas terhadap pengawasan anggaran. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan Daerah*, 12(3), 45–58.



#### dan Peraturan Pemerintah

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Daerah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
Undang-Undang No. 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara.  
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.  
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (digantikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014).  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah).  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

